PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2024

KEMANTREN GONDOMANAN

KOTA YOGYAKARTA

2023

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta merupakan penjabaran dari Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor ..... Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Disamping itu, juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun sebagai implementasi dari tahapan perencanaan tahunan. Penyusunan Rencana Kerja merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan. Diharapkan penyusunan Rencana Kerja ini dapat memberikan arah dan pedoman untuk rencana kegiatan Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta Tahun 2024.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**
DAFTAR ISI ..... **ii**
DAFTAR TABEL ..... **iii**
DAFTAR GAMBAR ..... **iv**

BAB I PENDAHULUAN ..... **I - 1**
1.1. Latar Belakang ..... I - 1
1.2. Landasan Hukum ..... I - 2
1.3. Maksud dan Tujuan ..... I - 3
1.3.1. Maksud ..... I - 3
1.3.2. Tujuan ..... I - 3
1.4. Sistematika Penulisan ..... I - 3

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU ..... **II - 1**
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta Tahun 2022 dan Capaian Renstra Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta ..... II - 1
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta ..... II - 8
2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD ..... II - 9
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ..... II - 13

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH ..... **III - 1**
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ..... III - 1
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta ..... III - 3
3.3. Program dan Kegiatan ..... III - 3

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ..... **IV - 1**

BAB V PENUTUP ..... **V - 1**

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Realisasi Fisik dan Keuangan Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta Tahun 2022 ..... II - 3
Tabel 2.2 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta Tahun 2022 ..... II - 5
Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta Sampai Dengan Tahun 2022 ..... II - 8
Tabel 2.4 Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Yogyakarta Tahun 2024 ..... II - 12
Tabel 3.1 Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2024 ..... III - 2
Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta ..... III - 3
Tabel 4.1 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 ..... IV - 3

DAFTAR GAMBAR

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja).

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang bersifat lebih operasional.

Renja Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta merupakan penjabaran dari Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor … Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencaan Pembangunan Daerah.

Proses penyusunan Renja Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor … Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta, evaluasi pelaksanaan Renja Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta tahun sebelumnya, dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta. Selanjutnya, Renja Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta Tahun 2024 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta Tahun 2024.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta Tahun 2024 mendasarkan pada peraturan yang mengkait, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9);

10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 25 Seri D);
11. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 22);
12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 35);
13. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor … Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023 Nomor …).

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Renja Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penentuan program dan kegiatan Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta tahun 2024 dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta secara berkesinambungan.

1.3.2. Tujuan

Penyusunan Renja Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta Tahun 2024 bertujuan:

1. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif, dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan Bappeda tahun 2024;
2. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2024 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta secara sistematis dan terorganisir;
3. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
4. Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta Tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja, proses penyusunan Renja, keterkaitan antara Renja dengan dokumen RKPD, Renstra, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan Rancangan APBD.

1.2. Landasan Umum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalampenyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta Tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Menggambarkan kajian/reviu terhadap Hasil Evaluasi Renja Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1).

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta

Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta

3.3. Program dan Kegiatan

Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta Tahun 2022 dan Capaian Renstra Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta

Penyusunan Renja Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Renja diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan, serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan serta hambatan/permasalahan yang dihadapi.

Untuk penyusunan Renja Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta Tahun 2024 diperlukan evaluasi hasil capaian tahun 2022 dan disajikan perkiraan pencapaian target Renstra sampai dengan tahun 2022. Pada tahun 2022, Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta melaksanakan sebanyak 4 (empat) program, 8 (delapan) kegiatan, dan 31 (tigapuluh satu) sub kegiatan dengan anggaran sebagaimana tertuang di dalam Perubahan APBD Tahun 2022 sejumlah Rp7.468.286.945,- (Tujuh miliar empat ratus enam puluh delapan juta duaratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah). Dalam pelaksanaannya, program tersebut dapat diselesaikan seluruhnya/100 persen dengan realisasi anggaran Rp7.077.553.345,- (Tujuh miliar tujuh puluh tujuh juta limaratus limapuluh tiga ribu tugaratus empat puluh lima rupiah) atau sebesar 94,76 persen.

Kinerja Kemantren Gondomanan dinilai berdasarkan pencapaian sasaran strategis Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan meningkat dihitung dengan formula :

jumlah nilai evaluasi perkembangan pembangunan kelurahan

: jumlah kelurahan.

Nilai yang didapat kemudian dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada tahun berjalan. Capaian kinerja organisasi Kemantren Gondomanan pada Tahun Anggaran 2022 dari target nilai 367 tercapai 367,36 atau dapat dinyatakan bahwa capaian kinerja organisasi Kemantren Gondomanan adalah **100,1%** dengan nilai peringkat kinerja **Sangat Tinggi.**

Upaya pencapaian sasaran strategis Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan meningkat, didukung dengan 4(empat) program yaitu :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; dengan indikator kinerja : nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Gondomanan meningkat
- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, dengan indikator kinerja : nilai survey kepuasan masyarakat meningkat;

- Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum; dengan indikator kinerja jumlah pelanggaran Perda menurun, dan
- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan. dengan indikator kinerja : angka swadaya masyarakat meningkat.

Pelaksanaan program-program Renja Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta Tahun 2022 sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dilaksanakan dengan 1 (satu) indikator, yaitu nilai Reformasi Birokrasi Kemantren Gondomanan meningkat. Program ini dilaksanakan oleh 1 (satu) bidang, yaitu Sekretariat Target program pada tahun 2022 adalah A(80), realisasi program sebesar A(87,19) dan capaian kinerja program sebesar 108,99 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 5.231.887.297,- dengan realisasi sebesar Rp 4.856.525.490,- atau sebesar 92,83 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah dukungan teknologi informasi berupa aplikasi JSS juga semakin memudahkan sistem prosedur dan kinerja administrasi keuangan dan kepegawaian di Kemantren Gondomanan. Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah :

a) Kegiatan yang bersifat “penjagaan”. Beberapa kegiatan di program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah khususnya yang bertujuan untuk pemeliharaan dan bersifat penjagaan (misal penggantian suku cadang, pembelian BBM) pada beberapa obyek sulit untuk diprediksi kebutuhannya (kapan perlu ganti suku cadang, penyerapan BBM yang kurang optimal karena mobilitas berkurang, dan sebagainya). Termasuk juga belanja pemakaian listrik/telepon yang tidak bisa tepat sesuai perkiraan dan pagu anggaran yang tersedia. Konsekuensi dari belanja semacam ini adalah target keuangan tidak bisa tercapai 100% (ada sisa anggaran), meskipun target fisik bisa tercapai 100%.
b) Dampak Pandemi Covid-19 yang masih terasa. Beberapa kegiatan di hampir semua program khususnya yang bersifat tatap muka dan mengumpulkan banyak orang dan berpotensi menimbulkan kerumunan terpaksa harus dirasionalisasi (dihapus atau dikurangi volumenya) pada anggaran perubahan, karena menyesuaikan dengan protokol kesehatan dan Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang penerapan PPKM. Kalaupun kegiatan tersebut tetap harus dilaksanakan maka harus mengikuti protokol kesehatan secara ketat.

B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, dilaksanakan dengan 1(satu) indikator kinerja yaitu nilai survey kepuasan masyarakat meningkat; Program ini dilaksanakan oleh 4 (empat) jawatan, yaitu Jawatan Praja, Jawatan Umum, Jawatan kemakmuran dan Jawatan Sosial Target program pada tahun 2022 adalah 88,57 realisasi program sebesar 88,62 dan capaian kinerja program sebesar 100,06 persen. Anggaran untuk

program ini sebesar Rp 299.651.254,- dengan realisasi sebesar Rp 298.596.254,- atau sebesar 99,65 persen.

Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah :

a) Kegiatan ini sangat menunjang keberhasilan pencapaian target pada pernyataan kinerja oleh karena merupakan pelayanan langsung kepada warga masyarakat melalui program Paket Komanan (Paket Komplit Gondomanan) yang dulunya dikenal dengan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan juga didukung oleh kegiatan fasilitasi lainnya baik penyelenggaraan pemerintahan maupun ketentraman dan ketertiban. Pelaksanaan Paket Komanan (Paket Komplit Gondomanan) yang dulunya dikenal dengan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dilakukan sesuai dengan aturan yang ada terkait pelayanan dengan maksud agar masyarakat merasa mudah, nyaman dan terlayani dengan ramah oleh petugas.
b) Gencarnya sosialisasi dan publikasi pelayanan di kecamatan yang dilakukan melalui berbagai media sosial seperti *website, facebook, instagram, youtube* dan bulettin Gondoarum menjadikan masyarakat makin memahami dan mendorong untuk makin aktif mengakses berbagai pelayanan dan informasi yang diberikan oleh Kemantren Gondomanan.
c) Dukungan teknologi informasi berupa aplikasi JSS juga semakin memudahkan sistem prosedur dan konektivitas interface pelayanan Kemantren Gondomanan dengan masyarakat.

Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah keterbatasan kuantitas dan kompetensi SDM.

C. Program Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Umum

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum; dilaksanakan dengan 1 (satu) indikator, yaitu pelanggaran Perda menurun. Program ini dilaksanakan oleh 1 (satu) bidang, yaitu Jawatan Keamanan. Target program pada tahun 2022 adalah 157 realisasi program sebesar 152 dan capaian kinerja program sebesar 103,18 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 160.615.000,- dengan realisasi sebesar Rp 160.615.000,- atau sebesar 100 persen. Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah ……. Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah …….

D. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dilaksanakan dengan 1 (satu) indikator, yaitu angka swadaya masyarakat meningkat. Program ini dilaksanakan oleh 2 (dua) kelurahan, yaitu Kelurahan Ngupasan dan Kelurahan Prawirodirjan. Target program pada tahun 2022 adalah Rp478.584.000,- realisasi program sebesar Rp515.392.000,- dan capaian kinerja program sebesar 107,69 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp1.776.133.394,- dengan realisasi sebesar Rp1.761.816.601,- atau sebesar 99,19 persen.

Faktor pendorong dari keberhasilan program ini adalah :

a) Kegiatan pemberdayaan masyarakat baik fisik maupun non fisik yang dilaksanakan di kemantren maupun kelurahan melibatkan masyarakat mulai dari proses perencanaan sampai dengan pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharaannya.
b) Partisipasi, dukungan, keterlibatan dan swadaya masyarakat yang cukup tinggi, sehingga sangat mendukung kelancaran kegiatan.

Sedangkan faktor penghambat yang masih ditemui dalam pelaksanaan program ini adalah :

a) Keterbatasan sumber daya manusia (SDM). Formasi pegawai Kemantren Gondomanan saat ini baru terpenuhi 74% dari kebutuhan sesuai hasil analisis jabatan, tentu ini belum memadai bagi organisasi Kemantren Gondomanan. Kekurangan personil terutama dirasakan di kelurahan mengingat adanya kebijakan Lurah sebagai Kuasa pengguna Anggaran (KPA) merangkat Pejabat Pembuat komitmen (PPKom), untuk melaksanakan tugas dan pelimpahan kewenangan yang semakin besar dan kompleks serta alokasi anggaran yang lebih besar kepada kelurahan. Kebijakan ini telah berjalan beberapa tahun namun tidak/belum disertai dengan penambahan personil. Sesuai hasil analisis jabatan, sebagai konsekuensi pengangkatan Lurah sebagai KPA seharusnya didukung tim/pejabat pengelola keuangan dan kegiatan yang memadai, dimana sesuai ketentuan beberapa jabatan harus diisi oleh PNS/ASN. Pada kenyataannya sudah ada penambahan personil di kelurahan namun hanya diperbolehkan mengangkat tenaga teknis melalui belanja jasa orang perseorangan untuk membantu pelayanan dan administrasi umum kegiatan. Upaya lain dilakukan untuk meningkatkan segi kualitas melalui berbagai bimbingan teknis dan diklat peningkatan kompetensi pegawai. Meskipun demikian, ketika tuntutan beban kerja semakin bertambah maka kemampuan SDM yang ada pun masih dirasa kurang memadai.
b) Dampak Pandemi Covid-19 yang masih terasa. Beberapa kegiatan di hampir semua program khususnya yang bersifat tatap muka dan mengumpulkan banyak orang dan berpotensi menimbulkan kerumunan terpaksa harus dirasionalisasi (dihapus atau dikurangi volumenya) pada anggaran perubahan, karena menyesuaikan dengan protokol kesehatan dan Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang penerapan PPKM. Kalaupun kegiatan tersebut tetap harus dilaksanakan maka harus mengikuti protokol kesehatan secara ketat.

Adapun realisasi target fisik dan keuangan masing-masing program dan kegiatan seperti pada Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1 Realisasi Fisik dan Keuangan Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta Tahun 2022

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan (*output*)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022				
		Target Kinerja		Realisasi Renja OPD		
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
		k	Rp	k	Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			**5.231.887.297**		**4.856.525.490**	**92,83%**
a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			2.500.000		2.500.000	100%
b. Koordinasi dan penyusunan DPA SKPD			31.253.040		31.253.016	99,99%
c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			1.800.000		1.800.000	100%
d. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			1.200.000		1.200.000	100%
e. Pelaksanaan penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			1.200.000		1.200.000	100%
f. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			1.200.000		1.200.000	100%
g. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			1.200.000		1.200.000	100%
h. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksanaan			600.000		600.000	100%
i. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD			1.200.000		1.200.000	100%
j. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			3.879.500		3.879.500	100%
k. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			52.203.745		52.203.745	100%
l. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			16.240.000		16.240.000	100%
m. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			69.594.000		69.594.000	100%
n. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			31.000.000		30.914.000	99,72%
o. Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1.500.000		1.500.000	100%
p. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik			99.720.000		78.378.332	78,60%
q. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			461.067.836		458.267.173	99,39%
r. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			92.108.176		83.027.876	90,14%
s. Pemeliharaan Mebel			3.300.000		3.300.000	100%
t. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin ainnya			26.800.000		26.800.000	100%
u. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			139.735.000		139.242.000	99,65%

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik			**299.651.254**		**298.596.254**	**99,65%**
a. Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat kemantren			104.567.072		103.567.072	99,04%
b. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum			69.078.000		69.078.000	100%
c. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha			34.796.182		34.796.182	100%
d. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait debngan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			91.210.000		91.155.000	99,94%
3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum			**160.615.000**		**160.615.000**	**100%**
a. Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			84.500.000		84.500.000	100%
b. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara RI			76.115.000		76.115.000	100%
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan			**1.776.133.394**		**1.761.816.601**	**99,19%**
a. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Prawirodirjan			598.780.000		597.528.000	99,79%
b. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Ngupasan			192.550.000		191.197.000	99,30%
c. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Prawirodirjan			638.004.130		627.272.128	98,32%
d. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Ngupasan			346.799.264		345.819.473	99,72%
			7.468.286.945		**7.077.553.345**	**94,77%**

Evaluasi capaian hasil indikator kinerja tahun 2022 pada Reviu Renstra Tahun 2017-2022 secara lengkap tercapainya target yang ditetapkan seperti dalam Tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta Tahun 2022

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada sasaran Perangkat Daerah:

1	Meningkatkan perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan	Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan meningkat	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan
Target			367
Realisasi			367,36

No.	Sasaran PD	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra OPD pada Akhir Renstra		Target Capaian Kinerja Renstra OPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Unit OPD Penanggung Jawab	Ket
										Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Target Renja OPD TW IV Tahun 2022		Realisasi Renja OPD TW IV Tahun 2022		Tingkat Realisasi TW IV Tahun 2022							
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
1		**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**																					
		a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																				
		b	Koordinasi dan penyusunan DPA SKPD																				
		c	Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																				
		d	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																				

No.	Sasaran PD	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra OPD pada Akhir Renstra		Target Capaian Kinerja Renstra OPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Unit OPD Penanggung Jawab	Ket
										Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Target Renja OPD TW IV Tahun 2022		Realisasi Renja OPD TW IV Tahun 2022		Tingkat Realisasi TW IV Tahun 2022							
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		e	Pelaksanaan penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																				
		f	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																				
		g	Koordinasi & Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																				
		h	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksanaan																				
		i	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD																				
		j	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																				
		k	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																				
		l	Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan																				

No.	Sasaran PD	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra OPD pada Akhir Renstra		Target Capaian Kinerja Renstra OPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Unit OPD Penanggung Jawab	Ket
										Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Target Renja OPD TW IV Tahun 2022		Realisasi Renja OPD TW IV Tahun 2022		Tingkat Realisasi TW IV Tahun 2022							
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		m	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																				
		n	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																				
		o	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																				
		p	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik																				
		q	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																				
		r	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan & Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																				
		s	Pemeliharaan Mebel																				
		t	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin ainnya																				
		u	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																				
Rata-rata Capaian Kinerja										92,83%													
Predikat Kinerja										Sangat Baik													

No.	Sasaran PD	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra OPD pada Akhir Renstra		Target Capaian Kinerja Renstra OPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Unit OPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Target Renja OPD TW IV Tahun 2022		Realisasi Renja OPD TW IV Tahun 2022		Tingkat Realisasi TW IV Tahun 2022							
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
2.		**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**																				
		a. Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat kemantren																				
		b. Koordinasi/Sinergi dgn Perangkat Daerah dan/ atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarpras Pelayanan Umum																				
		c. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dgn Pelayanan Perizinan Non Usaha																				
		d. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dgn Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																				
Rata-rata Capaian Kinerja									99.65 %													
Predikat Kinerja									Sangat Baik													

No.	Sasaran PD	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra OPD pada Akhir Renstra		Target Capaian Kinerja Renstra OPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Unit OPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Target Renja OPD TW IV Tahun 2022		Realisasi Renja OPD TW IV Tahun 2022		Tingkat Realisasi TW IV Tahun 2022							
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
3.		**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**																				
		a Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																				
		b Koordinasi/Sinergi dgn Perangkat Daerah yg Tugas dan Fungsinya di bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara RI																				
Rata-rata Capaian Kinerja									100%													
Predikat Kinerja									Sangat Baik													
4.		**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**																				
		a Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Prawirodirjan																				
		b Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Ngupasan																				

No.	Sasaran PD	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra OPD pada Akhir Renstra		Target Capaian Kinerja Renstra OPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Unit OPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Target Renja OPD TW IV Tahun 2022		Realisasi Renja OPD TW IV Tahun 2022		Tingkat Realisasi TW IV Tahun 2022							
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		c Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Prawirodirjan																				
		d Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Ngupasan																				
Rata-rata Capaian Kinerja									**99,16 %**													
Predikat Kinerja									**Sangat Baik**													
Total anggaran dari seluruh program									**7.468.286.945,-**								**7.077.553.345,-**					
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d 4) (%)									**94,77 %**													
Predikat kinerja dari seluruh program (Program 1 s.d. 4)									**Sangat Baik**													
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja			a. Ketersediaan anggaran yang semakin memadai b. Kualitas dan kompetensi SDM yang makin meningkat c. Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi semakin baik d. Inovasi Sistem dan Prosedur Pelayanan e. Pemanfaatan teknologi informasi f. Penerapan *system reward and punishment* untuk meningkatkan motivasi dan semangat kerja pegawai g. Peran Lembaga Sosial Kemasyarakatan h. Partisipasi dan Swadaya Masyarakat i. Sinergitas antar lembaga dalam Forkompimka																				

No.	Sasaran PD	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra OPD pada Akhir Renstra		Target Capaian Kinerja Renstra OPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2022 (%)		Unit OPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022		Target Renja OPD TW IV Tahun 2022		Realisasi Renja OPD TW IV Tahun 2022		Tingkat Realisasi TW IV Tahun 2022							
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja			a. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) b. Kegiatan yang bersifat “penjagaan” c. Dampak Pandemi Covid-19 yang masih terasa																			
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya			a. Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM pegawai. b. Peningjkatan efektivitas Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi. c. Peningkatan Inovasi Sistem dan Prosedur Pelayanan d. Peniongkatan pemanfaatan teknologi informasi e. Penerapan *system reward and punishment* untuk meningkatkan motivasi dan semangat kerja pegawai f. Peningkatan Peran Lembaga Sosial Kemasyarakatan g. Peningkatan Partisipasi dan Swadaya Masyarakat h. Penguatan Sinergitas antar lembaga dalam Forkompimka																			
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya			a. Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM pegawai. b. Peningjkatan efektivitas Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi. c. Peningkatan Inovasi Sistem dan Prosedur Pelayanan d. Peniongkatan pemanfaatan teknologi informasi e. Penerapan *system reward and punishment* untuk meningkatkan motivasi dan semangat kerja pegawai f. Peningkatan Peran Lembaga Sosial Kemasyarakatan g. Peningkatan Partisipasi dan Swadaya Masyarakat h. Penguatan Sinergitas antar lembaga dalam Forkompimka																			

Dari data sebagaimana Tabel 2.2 tersebut di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022 Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta
   a. Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 4 (empat) program dengan 4(empat) indikator kinerja program dan 31 kegiatan dengan 31 indikator kinerja kegiatan;
   b. Dari 4(empat) indikator kinerja program yang ditetapkan, terdapat 4 (empat) indikator yang melampaui target, 1 (satu) indikator merupakan hasil penilaian dari Inspektorat; dan
   c. Dari 31 indikator kinerja kegiatan, 31 indikator telah memenuhi target.
2. Perkiraan Capaian Target Reviu Renstra Tahun 2017-2022 sampai dengan Tahun 2022 Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta
   a. Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 4(empat) program dengan 4(empat) indikator kinerja program dan 31 kegiatan dengan 31 indikator kinerja kegiatan;
   b. Dari 4 (empat) indikator kinerja program yang ditetapkan, diperkirakan 4(empat) indikator program dapat memenuhi target yang masih dalam proses pencapaian target pada akhir periode Renstra; dan
   c. Dari 31 indikator kinerja kegiatan, diperkirakan telah memenuhi target pada akhir periode Renstra.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pasal 50 ayat 1 (satu) disebutkan bahwa Kecamatan (Kemantren) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan. Oleh karena itu kemantren merupakan salah satu fungsi penunjang yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu Kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat, dimana dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Kemantren dibantu oleh Kelurahan yang berkedudukan sebagai perangkat Kemantren.

Pembentukan organisasi Kemantren di Wilayah Kota Yogyakarta tidak terlepas dari adanya dinamika atau perubahan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah. Namun dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, kecamatan/kemantren menjadi salah satu perangkat daerah yang diatur melalui Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tersebut dan juga Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 121 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan Kota Yogyakarta pada Pasal 2 disebutkan bahwa Kemantren dipimpin oleh seorang

Mantri Pamong Praja yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Selanjutnya pada Pasal 4 disebutkan bahwa Kemantren mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan kelurahan di wilayah masing-masing. Sedangkan fungsi kemantren tertera pada Pasal 5 sebagai berikut :

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diatas, Kemantren mempunyai fungsi :

a. pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan melaksanakan penugasan urusan keistimewaan pada tingkat Kemantren;
b. pengoordinasian tugas dan fungsi unsur organisasi Kemantren;
c. penyelenggaraan kegiatan pemerintahan umum di tingkat Kemantren;
d. penyelenggaraan kegiatan ketenteraman dan ketertiban di tingkat Kemantren;
e. penyelenggaraan kegiatan perekonomian dan pembangunan di tingkat Kemantren;
f. penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat di tingkat Kemantren;
g. penyelenggaraan pembinaan teknis kelembagaan pemberdayaan masyarakat di tingkat Kemantren;
h. penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum di tingkat Kemantren;
i. penerbitan dokumen perizinan dan/atau dokumen nonperizinan sesuai kewenangan Kemantren;
j. pengoordinasian dan fasilitasi kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh instansi pemerintah di tingkat Kemantren;
k. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
l. pengoordinasian pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota;
m. pengoordinasian pelaksanaan penugasan keistimewaan di tingkat Kemantren;
n. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Kemantren;
o. pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional pada Kemantren;
p. pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Kemantren;
q. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan Kemantren;
r. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
s. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Kemantren; dan
t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Kemantren.

Selain melaksanakan fungsi tersebut diatas, kemantren di Kota Yogyakarta juga melaksanakan pelimpahan kewenangan dari Walikota Yogyakarta dengan ditetapkannya Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada Mantri Pamong Praja. Peraturan Walikota tersebut sebagai penyempurnaan dari peraturan walikota yang mengatur sebelumnya.

Secara rinci, jenis pelayanan yang diberikan Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta adalah meliputi:

1. Legalisasi Umum
2. Pendampingan Pelayanan Ijin Usaha
3. Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum
4. Pelayanan Informasi Publik

Upaya Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan di atas dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut:

1. Menyusun dan mereview semua SOP baik internal maupun pelayanan secara kontinyu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan dan regulasi yang ada/berlaku.
2. Sosialisasi pelayanan dan regulasi tentang Adminduk secara lebih masif melalui berbagai media baik online maupun offline.
3. Pendampingan akses dan proses layanan bagi warga masyarakat yang berkebutuhan khusus (lansia, disabilitas)
4. Sistem reward and punishment untukmmeningkatkan motivasi dan kinerja pegawai khususnya petugas pelayanan.

Berdasarkan RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022, Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik. Dalam penyusunan program dan kegiatan mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Reviu Renstra Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022, sehingga pengukuran kinerja pelayanan OPD mendasarkan pada tolok ukur dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut.

Secara lengkap, pencapaian target kinerja Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta terdapat dalam Tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Renja Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta Sampai Dengan Tahun 2022

Tujuan/Sasaran	Indikator	Target Renstra						Realisasi		Proyeksi	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024
Tujuan:											
Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan meningkat	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan	350	352	365	366	366,5	367	367	367,36	368	369
Sasaran:											
Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan meningkat	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan										

Pencapaian target tujuan dan sasaran Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta Tahun 2022 tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Tujuan "Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan meningkat" memiliki 1 (satu) indikator kinerja, yaitu "Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan" telah dapat melampaui target dimana realisasinya sebesar 367,36 dari target sebesar 367 dengan capaian kinerja sebesar 100,1 persen; dan
2. Sasaran "Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan meningkat" memiliki 1 (satu) indikator kinerja, yaitu "Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan", telah dapat melampaui target dimana realisasinya sebesar 367,36 dari target sebesar 367 dengan capaian kinerja sebesar 100,1 persen.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi di antaranya:

1. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM)
2. Kegiatan yang bersifat "penjagaan"
3. Dampak Pandemi Covid-19 yang masih terasa

Berdasarkan pada permasalahan yang ada, dalam rangka meningkatkan kinerja Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta di masa yang akan datang, tantangan yang harus dihadapi adalah:

1. Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM pegawai.

2. Peningkatan efektivitas Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi.
3. Peningkatan Inovasi Sistem dan Prosedur Pelayanan
4. Peniongkatan pemanfaatan teknologi informasi
5. Penerapan *system reward and punishment* untuk meningkatkan motivasi dan semangat kerja pegawai
6. Peningkatan Peran Lembaga Sosial Kemasyarakatan
7. Peningkatan Partisipasi dan Swadaya Masyarakat
8. Penguatan Sinergitas antar lembaga dalam Forkompimka

Sedangkan peluang bagi Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta dalam melaksanakan ketugasannya adalah dengan:

1. Dukungan personil yang semakin memadai baik jumlah maupun kualitasnya dengan adanya CPNS baru dan kesempatan untuk mengikuti berbagai diklat.
2. Dukungan sarana prasarana dan sistem yang semakin memadai.

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan, dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta, sebagai berikut:

1. Pelayanan Publik

Kemantren merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berfungsi sebagai garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat, sehingga citra pelayanan publik yang diberikan oleh kemantren kepada masyarakat mencerminkan pula citra pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta pada umumnya. Oleh karena itu maka perbaikan dalam sistem pelayanan di tingkat kemantren menjadi hal yang harus terus menerus dilakukan.

Dalam rangka optimalisasi peran strategis pelayanan kemantren untuk mendukung tatakelola pemerintahan yang baik sejalan dengan apa yang digariskan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang PelayananPublik, yang mengatur pula azas-azas pelayanan publik yang harus diperhatikan, antara lain:

1) kepentingan umum;
2) kepastian hukum;
3) kesamaan hak;
4) keseimbangan hak dan kewajiban;
5) profesionalisme;
6) partisipatif;
7) persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
8) keterbukaan;
9) akuntabilitas;
10) fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
11) ketepatan waktu; dan
12) kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kemantren (PATEN), peran dan fungsi kemantren sebagai pusat pelayanan masyarakat makin diteguhkan dan pada tanggal 12 Desember 2012 PATEN di kemantren se Kota Yogyakarta diresmikan oleh Walikota Yogyakarta. Hal itu menunjukkan tekad dan komitmen Pemerintah Kota Yogyakarta dalam mewujudkan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Sejalan dengan itu, dalam rangka sinkronisasi antara kebutuhan masyarakat dalam pelayanan dengan kemampuan atau kapasitas kemantren dalam memberikan fasilitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat maka telah disusun Standar Pelayanan Publik (SPP) yang dalam proses penyusunannya melibatkan unsur masyarakat. Dalam rangka optimalisasi PATEN didukung dengan 4 (empat) program dan 12 (duabelas) kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan OPD.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Pasal 5 menyebutkan bahwa kecamatan (kemantren) sebagai penyelenggara PATEN harus memiliki persyaratan substantif, administratif dan teknis. Secara substantif Mantri Pamong Praja telah menerima pelimpahan sebagian kewenangan dari Walikota Yogyakarta sesuai dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 135 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada Mantri Pamong Praja, yang mencakup pula kewenangan di bidang perizinan dan non perizinan. Persyaratan administratif juga telah dipenuhi dengan adanya Standar Pelayanan Publik (SPP) sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. Selanjutnya persyaratan teknis telah dipenuhi dengan adanya sarana dan prasarana pendukung pelayanan. Pemenuhan persyaratan teknis lainnya adalah kesiapan aparatur birokrasi di tingkat kemantren.

Kemantren merupakan ujung tombak pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik disebutkan bahwa penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi beberapa prinsip, salah satunya adalah kelengkapan sarana dan prasarana, yaitu tersedianya sarana dan prasarana kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informasi (telematika).

Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka di Kemantren Gondomanan telah dilengkapi dengan gedung kantor dan juga sarana pendukung kelancaran pelayanan maupun penunjang kegiatan administrasi perkantoran (perangkat keras dan lunak), sehingga mendukung dalam menunjang pelaksanaan kegiatan baik untuk kebutuhan administrasi perkantoran maupun pelayanan kepada masyarakat. Kemantren Gondomanan juga telah melakukan perbaikan dan pengadaan sarana dan prasarana kerja antara lain perbaikan dan pemeliharaan alat-alat kantor, pembelian alat kantor, perbaikan gedung kantor kemantren dan kelurahan.

Untuk mengukur kinerja aparatur Kemantren Gondomanan dalam memberikan pelayanan publik, sekaligus untuk mengetahui kebutuhan dan harapan masyarakat maka dilakukan survei kepuasan masyarakat (SKM). Pengukuran SKM dilaksanakan sebanyak dua kali dalam setahun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat

Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 63 Tahun 2017 tentang Pedoman pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat. Hasil pengukuran SKM merupakan indikator kinerja program dan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Kemantren Gondomanan.

2. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah upaya untuk melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan kegiatan dan pengawasan. Pengambilan kebijakan kemantren dimulai dari proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sejak dari tingkat kampung, tingkat kelurahan dan kemantren yang melibatkan representasi unsur-unsur dalam masyarakat. Perencanaan pada sisi ini merupakan hasil dari masukan masyarakat (*bottom up planning*) melalui musyawarah pembangunan. Namun sejalan dengan pelimpahan kewenangan yang begitu dinamis maka beberapa aspek perencanaan juga bersifat *given* atau ditetapkan oleh pemerintah tingkat atasnya baik Pemerintah Kota, Provinsi maupun Pemerintah Pusat melalui dinas-dinas/instansi terkait. Sehingga proses perencanaan *bottom up planning* harus dipadukan dengan perencanaan yang bersifat *topdown*.

Pemberdayaan masyarakat pada tataran kemantren dilakukan melalui kegiatan fisik maupun non fisik yang menjadi kewenangan Mantri Pamong Praja dan Lurah sesuai dengan peraturan walikota tentang pelimpahan kewenangan. Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan kemantren dan kelurahan antara lain berupa pelatihan, penyuluhan, sosialisasi, peningkatan kapasitas kader masyarakat atau kelompok masyarakat. Kegiatan pemberdayaan masyarakat ini direncanakan oleh masyarakat, sasaran, penerima manfaat dan pelaksananya juga dari masyarakat, hingga pengawasan monitoring dan evaluasi pun selalu melibatkan partisipasi masyarakat secara langsung. Kinerja program pemberdayaan masyarakat diukur dari angka Swadaya murni masyarakat.yang dilaporkan oleh kelurahan.

3. Pembangunan Kewilayahan

Pelaksanaan pembangunan wilayah yang bersifat kegiatan pembangunan fisik harus mengacu pada peraturan wallikota yang mengatur tentang pelimpahan kewenangan. Sehingga kegiatan bersifat fisik dalam pembangunan selain perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang melibatkan warga masyarakat harus memperhatikan kewenangan yang dimiliki oleh kemantren disamping kesesuaian dengan kemampuan pagu anggaran atau pendanaan dari Pemerintah Kota Yogyakarta.

Pembangunan wilayah berkorelasi dengan tingkat perkembangan pembangunan kelurahan/kemantren. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan bahwa untuk mengetahui efektivitas, tingkat perkembangan desa dan kelurahan, kemajuan, kemandirian, keberlanjutan pembangunan, kesejahteraan masyarakat serta daya saing desa dan kelurahan melalui pembangunan Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, diperlukan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan.

Untuk mendapatkan hasil evaluasi perkembangan desa dan kelurahan, diperlukan instrumen sebagai alat ukur perkembangan Desa dan kelurahan.

Evaluasi Perkembangan Desa dan kelurahan adalah suatu upaya penilaian tingkat penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan yang didasarkan pada instrumen evaluasi perkembangan Desa dan kelurahan guna mengetahui efektivitas dan status perkembangan serta tahapan kemajuan Desa dan kelurahan. Tingkat perkembangan Desa dan kelurahan adalah status tertentu dari capaian hasil dari Desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pemerintah Desa dan kelurahan.

Evaluasi perkembangan desa dan kelurahan, meliputi pemantauan dan penilaian tingkat perkembangan desa dan kelurahan. Evaluasi perkembangan desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud berupa evaluasi bidang pemerintahan, evaluasi bidang kewilayahan, dan evaluasi bidang kemasyarakatan.

4. Pengarusutamaan Gender dalam Perencanaan Pembangunan

Perspektif pengarusutamaan gender menjadi pertimbangan dan harus selalu diintegrasikan dalam kegiatan pembangunan fisik maupun kegiatan yang bersifat non fisik. Dengan kata lain pengarusutamaan gender menjadi bagian dari perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh setiap Perangkat Daerah. Output dari program yang dilakukan oleh Perangkat Daerah Kemantren tetap responsif dan sensitif terhadap kebijakan pengarusutamaan gender, dimana sasaran dan perencanaan melibatkan kelompok rentan 5 (lima) afirmatif gender yaitu perempuan, warga miskin, lansia, anak-anak dan penyandang disabilitas.

Setiap program yang dilakukan harus melibatkan 5 (lima) kelompok afirmatif gender mulai dari proses perencanaan. Partisipasi dalam perencanaan tidak boleh membatasi apalagi menghalangi aspirasi dan kebutuhan kelompok rentan sebagaimana yang telah disebutkan pada paragraf sebelumnya, sesuai dengan kondisi dan ketersediaan sumber daya yang dimiliki Kemantren Gondomanan. Hal yang sama juga dilakukan pada pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah (pemenuhan hak akses) namun tetap memperhatikan kewenangan yang diberikan oleh Walikota Yogyakarta kepada Mantri Pamong Praja.

Afirmasi gender dalam program/kegiatan diterapkan mulai dari tahapan perencanaan melalui penyusunan dokumen GAP GBS (Gender Affirmative Program/Gender Budget Statements) pada setiap tahapan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

5. Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan amanat kepada badan publik untuk dapat menyajikan informasi publik sesuai dengan jenisnya terutama terhadap permohonan informasi publik yang berada dalam penguasaanya. Oleh karena itu perlu adanya standar yang jelas dan mudah bagi pemohon informasi publik. Demikian juga dengan pengelolaan internal informasi publik yang menjadi penguasaan badan publik harus lebih tertib dan tertata dengan baik agar jika sewaktu-waktu

dibutuhkan dapat segera disajikan dengan baik. Meskipun demikian, sebagian informasi publik mungkin tidak dapat diberikan kepada pihak pemohon, dengan alasan tertentu sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Sebuah informasi dapat dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan sehingga tidak dapat diakses oleh publik sebagaimana informasi yang lainnya.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, serta Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, maka di setiap badan publik dibentuk Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID). Penunjukan PPID di Kota Yogyakarta ditetapkan dengan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 207 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta. Untuk menilai kinerja PPID maka setiap tahun dilakukan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi oleh Komisi Informasi Daerah, yang menunjukkan seberapa informatif kah suatu badan publik.

6. Reformasi Birokrasi

Krisis ekonomi yang dialami Indonesia tahun 1997, pada tahun 1998 telah berkembang menjadi krisis multidimensi. Kondisi tersebut mengakibatkan adanya tuntutan kuat dari segenap lapisan masyarakat terhadap pemerintah untuk segera diadakan reformasi penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sejak itu, telah terjadi berbagai perubahan penting yang menjadi tonggak dimulainya era reformasi di bidang politik, hukum, ekonomi, dan birokrasi, yang dikenal sebagai reformasi gelombang pertama. Reformasi gelombang pertama di bidang birokrasi mengalami ketertinggalan dibanding bidang politik, ekonomi, dan hukum. pada tahun 2004, pemerintah menegaskan kembali pentingnya penerapan prinsip-prinsip clean government dan good governance, dan mengangkat program utama yaitu membangun aparatur negara melalui penerapan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi gelombang pertama secara bertahap dilaksanakan tahun 2004.

Sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024; dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, maka pada pidato kenegaraan dalam rangka memperingati ulang tahun ke-64 Kemerdekaan RI di depan Sidang DPR RI tanggal 14 Agustus 2009, Presiden menegaskan kembali tekad pemerintah untuk melaksanakan reformasi gelombang kedua. reformasi birokrasi bermakna perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan Indonesia, sebuah pertaruhan besar bagi bangsa Indonesia dalam menyongsong tantangan abad ke-21.

Sesuai dengan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 502 Tahun 2017 tentang Penetapan Roadmap Reformasi Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022 di Pemerintah Kota Yogyakarta maka ditetapkan kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di tingkat Makro berupa kebijakan penerapan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kota Yogyakarta pada 8 (delapan area perubahan) sesuai roadmap Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022; di tingkat Meso berupa pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada 8 (delapan) area perubahan dengan penetapan perangkat daerah/unit kerja sebagai penanggung jawab/leading sector area perubahan tingkat Pemerintah Kota Yogyakarta; dan di tingkat Mikro berupa pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada 8 (delapan) area perubahan pada perangkat daerah/unit kerja yang selaras dengan roadmap Pemerintah Kota Yogyakarta.

Salah satu catatan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Kementerian PAN dan RB terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kota Yogyakarta tahun 2020 adalah bahwa penerapan reformasi birokrasi belum merata pada seluruh Perangkat Daerah/unit kerja Pemerintah Kota Yogyakarta, khususnya pada Perangkat Daerah/unit kerja yang tidak terpilih dalam pengisian Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB). Untuk itu maka kemudian direkomendasikan agar memperluas pelaksanaan reformasi birokrasi dengan mewajibkan seluruh Perangkat Daera/unit kerja menyampaikan laporan hasil pelaksanaan reformasi birokrasi melalui aplikasi PMPRB secara tepat waktu. Rekomendasi tersebut ditindaklanjuti dengan pelaksanaan reformasi birokrasi pada Perangkat Daerah/unit kerja dan mewajibkan seluruh Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil pelaksanaan reformasi birokrasi. Selanjutnya untuk lebih mengoptimalkan dan memotivasi pelaksanaan reformasi birokrasi maka nilai indeksi pelaksanaan RB ditetapkan sebagai salah satu indikator kinerja program internal di setiap OPD dan capaian indeks RB menjadi salahsatu indikator dalam pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

7. Dana Keistimewaan

Sejalan dengan bergulirnya pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan daerah Istimewa Yogyakarta yang telah bergulir selama satu dasawarsa maka institusi kemantren/kelurahan selain mengalami sejumlah perubahan nomenklatur kelembagaan, tugas pokok dan fungsi, juga mulai terlibat dalam pelaksanaan program/kegiatan yang dibiayai dari anggaran dana keistimewaan. Keterlibatan kemantren/kelurahan dalam program/kegiatan dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi dan pelaporan. Tantangan yang dihadapi kemantren/kelurahan dalam situasi ini salah satunya adalah kurangnya personil baik secara kuantitas maupun kualitas (kompetensi) untuk menangani tugas tambahan terkait dana keistimewaan ini.

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rumusan tematik pembangunan pada RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2024 adalah **"*Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Keberlanjutan Pembangnan Kota Yogyakarta*"** dengan 4 (empat) prioritas daerah, yaitu:

1. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia, diwujudkan melalui peningkatan pendidikan, peningkatan kesehatan, dan penurunan angka kemiskinan.

   Pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan adalah tiga hal yang membutuhkan perhatian besar untuk dikuatkan dan ditingkatkan. Terlebih karena dampak dari pandemi yang menjadikan beberapa hal mendasar mengalami hambatan. Di bidang pendidikan, tata hidup yang baru dengan sistem pembelajaran jarak jauh di tahun 2020 membuat proses belajar menjadi berubah drastis. Di bidang kesehatan, pola hidup sehat menjadi kebiasaan yang sangat penting dan dukungan terhadap masalah kesehatan masih tetap menjadi prioritas. Selain itu, angka kemiskinan yang melonjak di masa pandemi Covid-19 menjadi hal penting yang harus segera ditangani. Peningkatan kualitas SDM di Kota Yogyakarta menjadi prioritas pertama untuk menjadi landasan dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat. Prioritas ini didukung dengan adanya keberdayaan masyarakat yang cukup tinggi.

2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman, ditekankan pada pengembangan wilayah dengan menciptakan potensi ekonomi lokal/kewilayahan, serta pemerataan pembangunan infrastruktur dengan tujuan mengurangi ketimpangan wilayah dan meningkatkan distribusi komoditas antar wilayah untuk mendukung pariwisata berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

   Setelah dukungan terhadap SDM, dibutuhkan pengembangan untuk mendukung bertumbuhnya potensi ekonomi lokal/kewilayahan untuk bisa mendukung kehidupan masyarakat. Adanya beberapa isu terkait permukiman serta pemerataan pembangunan infrastruktur ditujukan untuk mengurangi ketimpangan wilayah.

   Pembangunan dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas perumahan permukiman serta kesesuaian pemanfaatan ruang yang diselaraskan dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta maupun Kota Yogyakarta. Prioritas lingkungan hidup dalam meningkatkan kualitas lingkungan yang diindikasikan pada usaha perbaikan kualitas air, kualitas udara perkotaan yang terintegrasi dengan penanganan transportasi, serta kualitas tanah. Selain itu, peningkatan kualitas infrastruktur dilakukan untuk mendukung aksesibilitas masyarakat dengan kemudahan pergerakan lalu lintas, pedestrian, dan jaringan komunikasi yang selaras dengan kota cerdas.

3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat, diarahkan pada peningkatan kegiatan pariwisata sebagai pemantik aktivitas ekonomi kota Yogyakarta.

   Pariwisata memiliki peran yang besar dan pertumbuhan tertinggi pada Struktur PDRB Kota Yogyakarta tahun 2019. Pengembangan sarana dan prasarana sebagai titik ungkit baru perekonomian wilayah yang mendukung pariwisata Kota Yogyakarta diupayakan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Prioritas pada pariwisata ini dilakukan dalam berbagai hal. Wilayah disiapkan untuk mengambil bagian dalam kegiatan pariwisata, baik sebagai tujuan wisata berbasis wilayah, UMKM serta aplikasi seni dan budaya dalam peningkatan pariwisata. Perhatian kepada pelaku usaha yang terkait

secara langsung maupun tidak langsung dengan pariwisata serta pengembangan berbasis wilayah menjadi kekuatan kota untuk meningkatkan aktivitas ekonominya untuk mengurangi ketimpangan pendapatan dan menurunkan angka kemiskinan. Kesiapan ini dilaksanakan untuk menjadi dasar bangkitan ekonomi di seluruh kota.

Kegiatan ekonomi yang mendekat langsung di wilayah, memperkuat wilayah dengan penganggaran di wilayah yang optimal serta menyiapkan pendukung bagi para pelaku pariwisata dari tingkat kota membawa perekonomian kota bersama berkembang dan tumbuh. Penyusunan data tunggal, digitalisasi UMKM dan seni budaya dikembangkan senyampang dengan berbagai promosi dan digitasi usaha wisata yang mendukung pariwisata Kota Yogyakarta.

Perekonomian yang sempat terdampak cukup membutuhkan perkuatan untuk makin memiliki daya tahan terhadap pengaruh berbagai hal. Kebijakan diarahkan pada skema peningkatan daya tahan di bidang ekonomi. Upaya mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi, serta peningkatan pendapatan daerah menjadi prioritas, melalui pengembangan sektor ekonomi strategis kota yang didukung oleh pengembangan infrastruktur wilayah, seluruh daerah digerakkan bersama dengan kolaborasi dari *stakeholder* pembangunan dan dalam upaya berantai untuk meningkatkan aktivitas distribusi komoditas serta kegiatan pariwisata.

4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik, diarahkan pada peningkatan tata kelola dan kelembagaan, serta peningkatan kinerja aparatur dalam mendukung pembangunan.

   Pengelolaan sumber daya dalam birokrasi serta inovasi dilakukan untuk dapat meningkatkan pelayanan publik termasuk optimalisasi dalam merespon perubahan tatanan dalam masa pandemi serta masa setelah pandemi.

Penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kota Yogyakarta dituangkan ke dalam 11 (sebelas) sasaran daerah, yaitu:

1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan;
2. Meningkatnya Kualitas Pariwisata;
3. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi;
4. Menurunnya Kemiskinan Masyarakat;
5. Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang;
6. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup;
7. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat;
8. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan;
9. Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat;
10. Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah; dan
11. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat.

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta mendukung pencapaian sasaran ke 7, yaitu Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat.

Untuk selanjutnya, dalam melakukan reviu dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta Tahun 2024, yaitu sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.4 Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Yogyakarta Tahun 2024

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOM-POK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**100.000.000**							**0**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**100.000.000**							**0**	
1.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**						**100.000.000**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**0**	**Kemantren Gondomanan**
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya						100.000.000				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	Kemantren Gondomanan
	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja	*GELAR SENI BUDAYA POTENSI WILAYAH (Kegiatan)*				*1*	100.000.000 *100.000.000*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Keistimewaan DIY*					-	Kemantren Gondomanan
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**5.761.111.493**							**4.111.234.945**	
	7.01	**KECAMATAN ADMINISTRASI**						**5.761.111.493**							**4.111.234.945**	

1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondomanan (Nilai)***				***A***	**5.043.200.795**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**4.111.234.945**	**Kemantren Gondomanan**
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						74.790.500							69.346.000	Kemantren Gondomanan
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						2.940.000							1.840.000	Kemantren Gondomanan
			Penggandaan (Lembar)				*4.400*	*1.100.000*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
			Rapat koordinasi (Kali)				*4*	*1.840.000*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						2.005.000							1.380.000	Kemantren Gondomanan
			Penggandaan (Lembar)				*2.500*	*625.000*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
			Rapat Koordinasi (Kali)				*4*	*1.380.000*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						1.937.000							1.380.000	Kemantren Gondomanan
			Penggandaan (Lembar)				*2.300*	*557.000*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						

			Rapat Koordinasi (Kali)				*3*	*1.380.000*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						60.916.000							59.916.000	Kemantren Gondomanan
			Jasa Penyedia Lainnya Orang Perseorangan Aktivitas Pengolahan Data Kemantren Gondomanan 1 (Bulan)				*12*	*57.156.000*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
			Penggandaan (Lembar)				*4.000*	*1.000.000*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
			Rapat Koordinasi (Kali)				*4*	*2.760.000*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						2.442.500							1.380.000	Kemantren Gondomanan
			Penggandaan (Lembar)				*4.250*	*1.062.500*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
			Rapat Koordinasi (Kali)				*4*	*1.380.000*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						2.670.000							2.070.000	Kemantren Gondomanan
			Penggandaan (Lembar)				*2.400*	*600.000*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						

			Rapat Koordinasi (Kali)				*3*	*2.070.000*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.880.000							1.380.000	Kemantren Gondomanan
			Penggandaan (Lembar)				*2.000*	*500.000*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
			Rapat Koordinasi (Kali)				*4*	*1.380.000*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.908.620.850							3.905.860.850	Kemantren Gondomanan
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						3.899.880.850							3.899.880.850	Kemantren Gondomanan
			Gaji dan Tunjangan ASN (Bulan)				*12*	*3.899.880.850*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						1.380.000							1.380.000	Kemantren Gondomanan
			Rapat Koordinasi (Kali)				*4*	*1.380.000*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						1.380.000							-	Kemantren Gondomanan
			Rapat Koordinasi (Orang)				*15*	*1.380.000*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
	7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						1.380.000							-	Kemantren Gondomanan

			Rapat Koordinasi (Kali)				*2*	*1.380.000*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Rapat Koordinasi (Kali)*				*2*	1.380.000 *1.380.000*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					1.380.000	Kemantren Gondomanan
	7.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	*Rapat Koordinasi (Kali)*				*2*	1.380.000 *1.380.000*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					1.380.000	Kemantren Gondomanan
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	*Rapat Koordinasi (Kali)*				*4*	1.840.000 *1.840.000*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					1.840.000	Kemantren Gondomanan
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						920.000				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			920.000	Kemantren Gondomanan
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Rapat Koordinasi (Kali)*				*4*	920.000 *920.000*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					920.000	Kemantren Gondomanan

	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						690.000				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			690.000	Kemantren Gondomanan
	7.01.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	*Rapat Koordinasi (Kali)*				*2*	690.000 *690.000*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					690.000	Kemantren Gondomanan
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						157.208.445							132.918.095	Kemantren Gondomanan
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor -alat listrik (Paket)*				*5*	3.755.500 *3.755.500*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					3.755.500	Kemantren Gondomanan
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Paket)*				*3*	47.056.595 *47.056.595*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					47.056.595	Kemantren Gondomanan
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan (Paket)*				*3*	24.290.000 *24.290.000*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					-	Kemantren Gondomanan
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						82.106.350							82.106.000	Kemantren Gondomanan

			Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi (Laporan)				*12*	*82.106.350*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						8.700.000							-	Kemantren Gondomanan
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Pengadaan Printer (Unit)*				8.700.000 *6*	*8.700.000*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					-	Kemantren Gondomanan
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						590.758.000							1.500.000	Kemantren Gondomanan
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)*				1.500.000 *3*	*1.500.000*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					1.500.000	Kemantren Gondomanan
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Laporan)*				92.670.000 *36*	*92.670.000*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					-	Kemantren Gondomanan
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Laporan)*				496.588.000 *24*	*496.588.000*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					-	Kemantren Gondomanan
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						301.513.000							-	Kemantren Gondomanan

	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Unit)*				*17*	103.775.000 *103.775.000*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					-	Kemantren Gondomanan
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Unit)*				*1*	12.238.000 *12.238.000*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					-	Kemantren Gondomanan
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Isi ulang APAR Kantor Kemantren dan Kelurahan (Buah)* *Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (Unit)*				*4* *48*	26.500.000 *900.000* *25.600.000*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)* *(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah* *Lain-lain PAD Yang Sah*					-	Kemantren Gondomanan

	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Pemeliharaan Gedung Kantor (Unit)*				*2*	159.000.000 *159.000.000*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					-	Kemantren Gondomanan
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Gondomanan (poin)***				***88,70***	**28.984.250**							**0**	**Kemantren Gondomanan**
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum						9.900.000							-	Kemantren Gondomanan
	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	*Monitorig dan Evaluasi Pembangunan di Wilayah (Bulan)*				*12*	9.900.000 *9.900.000*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					-	Kemantren Gondomanan
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						19.084.250							-	Kemantren Gondomanan
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	*Operasional Pelayanan Umum dan Perizinan (Bulan)*				*12*	19.084.250 *19.084.250*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					-	Kemantren Gondomanan

3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondomanan (Rp/Tahun)***				***1032240000***	**442.141.448**							**0**	**Kemantren Gondomanan**
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						76.675.000							-	Kemantren Gondomanan
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Pentas Wayang Jogja Night Carnival (Kegiatan)* *Senam Gondomanan Sehat (Kegiatan)*				*1* *1*	76.675.000 *62.425.000* *14.250.000*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)* *(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah* *Lain-lain PAD Yang Sah*					-	Kemantren Gondomanan
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						57.124.948							-	Kemantren Gondomanan
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	*Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kemantren dan Kelurahan (Laporan)*				*3*	43.294.772 *43.294.772*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					-	Kemantren Gondomanan
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan	*Evaluasi Kelurahan Tingkat Kemantren (Kegiatan)*				*1*	13.830.176 *12.055.000*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					-	Kemantren Gondomanan

			Penyusunan Data Monografi (Dokumen) *Penyusunan Profil Kelurahan (Dokumen)*				*1* *1*	*720.000* *1.055.176*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)* *(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah* *Lain-lain PAD Yang Sah*						
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						22.180.000							-	Kemantren Gondomanan
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	*Sarasehan Kelembagaan Masyarakat (Kali)*				*2*	13.100.000 *13.100.000*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					-	Kemantren Gondomanan
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	*Penyuluhan Tentang Peningkatan Kualitas Produk Gandeng Gendong (Kali)* *Pertemuan Rutin UMKM (Kali)*				*2* *4*	9.080.000 *5.400.000* *3.680.000*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)* *(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah* *Lain-lain PAD Yang Sah*					-	Kemantren Gondomanan
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						286.161.500							-	Kemantren Gondomanan
	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	*FASILITASI GAPOKTAN (Orang)*				*30*	32.875.000 *6.915.000*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					-	Kemantren Gondomanan

			GELAR POTENSI UMKM (Kegiatan)				*1*	*11.550.000*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
			PELATIHAN BARISTA (Orang)				*20*	*5.090.000*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
			PELATIHAN MEMBUAT UKIRAN BUAH DAN SAYUR (Orang)				*30*	*6.005.000*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
			PENYULUHAN TENTANG KUALITAS PRODUK UP2K (Orang)				*30*	*3.315.000*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing						56.277.500							-	Kemantren Gondomanan
			Latihan Karawitan (Orang)				*15*	*36.825.000*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
			Latihan Kethoprak (Orang)				*15*	*8.325.000*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
			Lomba menu masakan B2SA (Kegiatan)				*1*	*8.827.500*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
			Monev dan Edukasi Pelaksanaan PMT (Kali)				*2*	*2.300.000*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						

	7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	*EVALUASI PEMBANGUNAN RW Se-KEMANTREN GONDOMANAN (Kegiatan)* *FASILITASI BANK SAMPAH (Bulan)* *GM BERSIH (Kali)*				*1* *12* *12*	47.984.000 *6.380.000* *22.820.000* *18.784.000*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)* *(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)* *(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah* *Lain-lain PAD Yang Sah* *Lain-lain PAD Yang Sah*					-	Kemantren Gondomanan
	7.01.03.2.06.0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	*PELATIHAN BENCANA KEBAKARAN (Orang)*				*40*	4.460.000 *4.460.000*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					-	Kemantren Gondomanan
	7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	*EVALUASI PEMBERDAYAAN KELURAHAN (Kali)* *Fasilitasi Forum Kecamatan Inklusi (Orang)* *FASILITASI KAREJA (Kegiatan)*				*3* *100* *3*	144.565.000 *2.760.000* *9.850.000* *10.330.000*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)* *(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)* *(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKA*	*Lain-lain PAD Yang Sah* *Lain-lain PAD Yang Sah* *Lain-lain PAD Yang Sah*					-	Kemantren Gondomanan

										RTA)								
			FASILITASI KEGIATAN KARANG TARUNA (Kegiatan)				2	5.680.000	(Kemantren Gondoman an, KOTA YOGYAKA RTA)	Lain-lain PAD Yang Sah							
			Fasilitasi Kegiatan PKK Kemantren (Bulan)				12	49.785.000	(Kemantren Gondoman an, KOTA YOGYAKA RTA)	Lain-lain PAD Yang Sah							
			FASILITASI PENANGGUL ANGAN KEMISKINAN (Bulan)				12	20.350.000	(Kemantren Gondoman an, KOTA YOGYAKA RTA)	Lain-lain PAD Yang Sah							
			KEGIATAN KESATUAN GERAK PKK (Kegiatan)				1	4.615.000	(Kemantren Gondoman an, KOTA YOGYAKA RTA)	Lain-lain PAD Yang Sah							
			PENANGANA N STUNTING (Bulan)				12	11.910.000	(Kemantren Gondoman an, KOTA YOGYAKA RTA)	Lain-lain PAD Yang Sah							
			PENYULUHA N POLA ASUH ANAK DAN REMAJA DI ERA DIGITAL (Orang)				40	4.540.000	(Kemantren Gondoman an, KOTA YOGYAKA RTA)	Lain-lain PAD Yang Sah							
			RAKORD SENI BUDAYA DAN OLAHRAGA (Kegiatan)				2	13.340.000	(Kemantren Gondoman an, KOTA YOGYAKA RTA)	Lain-lain PAD Yang Sah							
			RAPAT KOORDINASI TKSK, PSM (Kali)				4	2.760.000	(Kemantren Gondoman an, KOTA YOGYAKA RTA)	Lain-lain PAD Yang Sah							
			SARASEHAN REMBUG MASALAH SOSIAL (Orang)				40	3.810.000	(Kemantren Gondoman an, KOTA YOGYAKA RTA)	Lain-lain PAD Yang Sah							

			SARASEHAN SENI DAN BUDAYA (Orang)				*50*	*4.835.000*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	***Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Gondomanan (Pelanggaran)***				***130***	**175.585.000**							**0**	**Kemantren Gondomanan**
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						175.585.000							-	Kemantren Gondomanan
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia						175.585.000							-	Kemantren Gondomanan
			FASILITASI PENGAMANAN DAN PEMANTAUAN WILAYAH (Bulan)				*12*	*73.740.000*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
			JOGO LEBARAN (Kegiatan)				*1*	*44.760.000*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
			OPERASI KETERTIBAN WILAYAH (Bulan)				*12*	*27.600.000*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
			PENYULUHAN TTG KAPASITAS SATLINMAS (Orang)				*30*	*3.315.000*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						

			PIKET SIAGA BENCANA (Hari)				*14*	*13.175.000*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
			SAPAAN ANAK KOS (Bulan)				*12*	*9.300.000*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
			SARASEHAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN WILAYAH40 (Orang)				*40*	*3.695.000*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Persentase permasalahan Kemantren Gondomanan terselesaikan sebagai hasil koordinasi (%)***				***100***	**71.200.000**							**0**	**Kemantren Gondomanan**
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						71.200.000							-	Kemantren Gondomanan
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional						21.170.000							-	Kemantren Gondomanan
			FASILITASI FORUM KEWASPADAN DINI MASYARAKAT (Orang)				*50*	*8.100.000*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
			FASILITASI FORUM PEMBAURAN KEBANGSAA				*50*	*13.070.000*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKA*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						

			N (Orang)						*RTA)*							
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	*FASILITASI FORKOMPIMKA (Bulan)* *FASILITASI KEGIATAN HUT RI (Kegiatan)*				*12* *1*	50.030.000 *20.760.000* *29.270.000*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)* *(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah* *Lain-lain PAD Yang Sah*					-	Kemantren Gondomanan
	J U M L A H							**5.861.111.493**							4.111.234.945	

	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.137.006.868**							**0**	
	7.01	**KECAMATAN ADMINISTRASI**						**1.137.006.868**							**0**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kelurahan Ngupasan**					**1.137.006.868**							**0**	**Kelurahan Ngupasan**
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						1.137.006.868							-	Kelurahan Ngupasan
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						522.128.500							-	Kelurahan Ngupasan
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						614.878.368							-	Kelurahan Ngupasan

1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kelurahan Prawirodirjan**					**1.266.040.000**							**0**	**Kelurahan Prawirodirjan**
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						1.266.040.000							-	Kelurahan Prawirodirjan
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						402.620.000							-	Kelurahan Prawirodirjan
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						863.420.000							-	Kelurahan Prawirodirjan
	J U M L A H T O T A L							**8.264.158.361**							**5.861.111.493**	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2024 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2023, yaitu melalui Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah, dan Musrenbang Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat maupun para pemangku kepentingan.

Pada Forum Organisasi Perangkat Daerah ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta selaku Organisasi Perangkat Daerah maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD Kota Yogyakarta. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2024 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024. Arah dan kebijakan makro tahun 2024 adalah :

1. Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan;
3. Revitalisasi indostri dan penguatan riset terapan;
4. Penguatan daya saing,;
5. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi;
6. Percepatan pembangunan infrastruktusr dasar dan konektivitas;
7. Percepatan pembangunan ibukota Negara (IKN); dan
8. Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Di samping arah dan kebijakan makro tersebut, tema yang diangkat dalam RKP Tahun 2024 adalah “Mempercepat transformasi ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” Tema tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam Prioritas Nasional sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; dan
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Terkait prioritas Pembangunan Nasional tersebut di atas, Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta melaksanakan fungsi …… urusan ……, memiliki kewajiban ……

Selain memperhatikan tema Pembangunan Nasional, penyusunan Renja juga memperhatikan dan mempertimbangan tema pembangunan Pemerintah DIY yang tercantum pada RKPD DIY Tahun 2024, yaitu ‘Pemerataan Aksesibilitas Layanan Publik yang Berkualitas dan Aktivitas Ekonomi Berbasis Sektor Unggulan’. Tema tersebut dipilih didasarkan pada pemikiran untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan dengan memfokuskan pada pemerataan aksesibilitas layanan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah yang relatif tertinggal, dengan mengedepankan Reformasi Kalurahan sebagai konsep sekaligus strategi untuk mencapai hal tersebut.

Pola kebijakan *'One Size Fit All'* dipandang tidak tepat digunakan, sehingga dibutuhkan strategi kolaborasi berbasis keunggulan daerah masing-masing. Untuk itu, Pemda DIY menerapkan model pembangunan reformasi kalurahan yaitu dengan meningkatkan kapasitas pemerintah kalurahan dan pemberdayaan masyarakat. Melalui reformasi kalurahan tersebut, diharapkan akan mampu mengembangkan kemandirian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam prioritas pembangunan DIY sebagai berikut:

1. Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Eksterm;
2. Pengembangan Kehidupan Ekonomi yang Layak;
3. Penurunan Ketimpangan (Antar Kelas Sosial, Antar Wilayah);
4. Peningkatan Kualitas SDM
5. Menciptakan Lingkungan Hidup yang Lebih Baik, Aman, dan Tenteram; dan
6. Penguatan *Good-Governance* Pada Berbagai Tingkatan.

Sebagaimana terhadap prioritas pembangunan nasional, Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta juga memiliki kewajiban untuk merumuskan prioritas perencanaan pembangunan daerah Kota Yogyakarta agar dapat berjalan secara sinergis dan selaras dengan prioritas pembangunan DIY tersebut di atas.

Mendasarkan pada prioritas pembangunan nasional dan pemerintah DIY yang bertujuan pada tercapainya sinergi pusat – daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, maka arah penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia;
2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan yang Aman dan Nyaman;
3. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat; dan
4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik.

Arah penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan;
2. Meningkatnya Kualitas Pariwisata;
3. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi;
4. Menurunnya Kemiskinan Masyarakat;
5. Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang;
6. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup;
7. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat;
8. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan;
9. Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat;
10. Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah; dan
11. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat.

Target sasaran pembangunan Kota Yogyakarta pada tahun 2024 ditetapkan sebagaimana Tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1 Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah	11,74 tahun
2	Meningkatnya Kualitas Pariwisata	Lama Tinggal Wisatawan	1,80 hari
3	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	4,30 – 5,60%
4	Menurunnya Kemiskinan Masyarakat	Persentase Penduduk Miskin	6,41 – 7,53%
5	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	70,50%
6	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	55,19 skala 0-100
7	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	Indeks Keberdayaan Masyarakat	69 skala 0-100
8	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	A nilai
		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP predikat
9	Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Angka Kriminalitas	525 kasus
		Jumlah Pelanggaran Perda	4.180 kasus
10	Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	Indeks Pengembangan Infrastruktur Wilayah	90,55 skala 0-100
11	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	74,78 tahun

Sumber: RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta

Renja Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta Tahun 2024 merupakan pelaksanaan dari Renstra Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta Tahun 2024 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta Tahun 2024, yaitu “Tingkat Pembangunan Kemantren Gondomanan meningkat” dengan indikator tujuan “Nilai Evaluasi Pembangunan Kemantren Gondomanan Meningkat”.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta yaitu ““Tingkat Pembangunan Kemantren Gondomanan meningkat”” dengan indikator sasaran ““Tingkat Pembangunan Kemantren Gondomanan meningkat””.

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta Tahun 2024 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026, yaitu sebagaimana Tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun			
				2023	2024	2025	2026
1	Tingkat Pembangunan Kemantren Gondomanan meningkat	Meningkatkan Nilai Evaluasi Pembangunan Kemantren Gondomanan	Nilai Evaluasi Pembangunan Kemantren Gondomanan	367	368	369	370

3.3. Program dan Kegiatan

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan Rancangan Awal RKPD, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta pada tahun 2024 terdiri dari 6 (enam rumusan program, … (……) rumusan kegiatan, dan … (……) rumusan sub kegiatan. Total anggaran untuk program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun 2024 adalah sebesar Rp …… (…… rupiah) dengan sumber pendanaan berasal dari APBD Kota Yogyakarta. Berikut adalah rangkaian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai perwujudan dari tugas pokok dan fungsi Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta yaitu:

1. Program PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN
2. Program PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
3. Program PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
4. Program PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
5. Program PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
6. Program PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta Tahun 2024 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Dalam merumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Mempedomani RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2024 serta Renstra Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Yogyakarta. Dalam hal ini, Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta memiliki peran dalam pencapaian tujuan "Tingkat Pembangunan Kemantren Gondomanan meningkat" dan sasaran "Meningkatkan Nilai Evaluasi Pembangunan Kemantren Gondomanan" dengan indikator sasaran "Nilai Evaluasi Pembangunan Kemantren Gondomanan".
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan dalam kerangka pembangunan daerah Kota Yogyakarta;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta;
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan; dan
7. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan dengan mengikuti aturan yang berlaku.

<u>Program dan Kegiatan</u>

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan Rancangan Awal RKPD, Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta memiliki 5 (lima) rumusan program, 31 (tigapuluh satu) rumusan kegiatan. Total anggaran untuk program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun 2024 adalah sebesar Rp … (… rupiah). Berikut rangkaian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang hendak dilaksanakan sebagai perwujudan dari tugas, pokok, dan fungsi Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta, yaitu:

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan

   Anggaran untuk program ini sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah)

   Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Sosial, yang terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1(satu) sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya

   Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah)

   Kegiatan ini terdiri dari 1(satu) sub kegiatan, yaitu:

   1) Gelar budaya Jogja, dengan anggaran Rp 100.000.000,-

2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

   Anggaran untuk program ini sebesar Rp

   Program ini dilaksanakan oleh Mantri Anom (Sekretariat) yang terdiri dari 21 kegiatan dan sebagai berikut :

   a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah; dengan anggaran Rp
   b. Koordinasi dan penyusunan DPA SKPD; dengan anggaran Rp
   c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD; dengan anggaran Rp
   d. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN; dengan anggaran Rp
   e. Pelaksanaan penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD; dengan anggaran Rp
   f. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD; dengan anggaran Rp
   g. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD; dengan anggaran Rp
   h. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksanaan; dengan anggaran Rp
   i. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD; dengan anggaran Rp
   j. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; dengan anggaran Rp
   k. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; dengan anggaran Rp
   l. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; dengan anggaran Rp
   m. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; dengan anggaran Rp
   n. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya; dengan anggaran Rp
   o. Penyediaan Jasa Surat Menyurat; dengan anggaran Rp
   p. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik; dengan anggaran Rp
   q. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor; dengan anggaran Rp
   r. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan; dengan anggaran Rp
   s. Pemeliharaan Mebel; dengan anggaran Rp
   t. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin ainnya; dengan anggaran Rp
   u. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya; dengan anggaran Rp

3. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Anggaran untuk program ini sebesar Rp …

Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Praja, Jawatan Umum, Jawatan Kemakmuran dan Jawatan Sosial, yang terdiri dari 4 kegiatan sebagai berikut :

a. Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat kemantren; dengan anggaran Rp
b. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum; dengan anggaran Rp
c. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha; dengan anggaran Rp
d. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait debngan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan; dengan anggaran Rp

4. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

   Anggaran untuk program ini sebesar Rp…

   Program ini dilaksanakan oleh Lurah Ngupasan dan Lurah Prawirodirjan, yang terdiri dari 4 kegiatan dengan … subkegiatan sebagai berikut :

   a. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Prawirodirjan; dengan anggaran Rp
   b. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Ngupasan; dengan anggaran Rp
   c. Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Prawirodirjan; dengan anggaran Rp
   d. Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ngupasan; dengan anggaran Rp

5. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

   Anggaran untuk program ini adalah sebesar Rp175.585.000,- (Seratus tujuhpuluh lima juta limaratus delapan puluh lima ribu rupiah).

   Program ini dilaksanakan oleh Jawatan Keamanan yang terdiri dari 2 kegiatan dengan … subkegiatan sebagai berikut :

   a. Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat; dengan anggaran Rp
   b. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara RI; dengan anggarabn Rp

Secara rinci, rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Renja Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta Tahun 2024 sebagaimana dalam Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024

Unit Organisasi : Kemantren Gondomanan
Sub Unit Organisasi : Kemantren Gondomanan

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOM-POK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**100.000.000**							**0**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**100.000.000**							**0**	
1.	**2.22.08**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN**						**100.000.000**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**0**	**Kemantren Gondomanan**
	2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya						100.000.000				Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia			-	Kemantren Gondomanan
	2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja	*GELAR SENI BUDAYA POTENSI WILAYAH (Kegiatan)*				*1*	100.000.000 *100.000.000*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Dana Keistimewaan DIY*					-	Kemantren Gondomanan

	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**5.761.111.493**							**4.111.234.945**	
	7.01	**KECAMATAN ADMINISTRASI**						**5.761.111.493**							**4.111.234.945**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondomanan (Nilai)***				***A***	**5.043.200.795**				**Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia**			**4.111.234.945**	**Kemantren Gondomanan**
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						74.790.500							69.346.000	Kemantren Gondomanan
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Penggandaan (Lembar)*				*4.400*	2.940.000 *1.100.000*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					1.840.000	Kemantren Gondomanan
			Rapat koordinasi (Kali)				*4*	*1.840.000*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Penggandaan (Lembar)*				*2.500*	2.005.000 *625.000*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					1.380.000	Kemantren Gondomanan
			Rapat Koordinasi (Kali)				*4*	*1.380.000*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						1.937.000							1.380.000	Kemantren Gondomanan

			Penggandaan (Lembar)				*2.300*	*557.000*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
			Rapat Koordinasi (Kali)				*3*	*1.380.000*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						60.916.000							59.916.000	Kemantren Gondomanan
			Jasa Penyedia Lainnya Orang Perseorangan Aktivitas Pengolahan Data Kemantren Gondomanan 1 (Bulan)				*12*	*57.156.000*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
			Penggandaan (Lembar)				*4.000*	*1.000.000*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
			Rapat Koordinasi (Kali)				*4*	*2.760.000*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						2.442.500							1.380.000	Kemantren Gondomanan
			Penggandaan (Lembar)				*4.250*	*1.062.500*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
			Rapat Koordinasi (Kali)				*4*	*1.380.000*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						2.670.000							2.070.000	Kemantren Gondomanan

			Penggandaan (Lembar) *Rapat Koordinasi (Kali)*				*2.400* *3*	*600.000* *2.070.000*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)* *(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah* *Lain-lain PAD Yang Sah*						
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Penggandaan (Lembar)* *Rapat Koordinasi (Kali)*				*2.000* *4*	1.880.000 *500.000* *1.380.000*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)* *(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah* *Lain-lain PAD Yang Sah*					1.380.000	Kemantren Gondomanan
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.908.620.850							3.905.860.850	Kemantren Gondomanan
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Gaji dan Tunjangan ASN (Bulan)*				*12*	3.899.880.850 *3.899.880.850*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					3.899.880.850	Kemantren Gondomanan
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Rapat Koordinasi (Kali)*				*4*	1.380.000 *1.380.000*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					1.380.000	Kemantren Gondomanan
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Rapat Koordinasi (Orang)*				*15*	1.380.000 *1.380.000*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKA*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					-	Kemantren Gondomanan

									RTA)							
	7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	*Rapat Koordinasi (Kali)*				*2*	1.380.000 *1.380.000*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					-	Kemantren Gondomanan
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Rapat Koordinasi (Kali)*				*2*	1.380.000 *1.380.000*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					1.380.000	Kemantren Gondomanan
	7.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	*Rapat Koordinasi (Kali)*				*2*	1.380.000 *1.380.000*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					1.380.000	Kemantren Gondomanan
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	*Rapat Koordinasi (Kali)*				*4*	1.840.000 *1.840.000*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					1.840.000	Kemantren Gondomanan
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						920.000				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			920.000	Kemantren Gondomanan

	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Rapat Koordinasi (Kali)*				*4*	920.000 *920.000*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					920.000	Kemantren Gondomanan
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						690.000				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			690.000	Kemantren Gondomanan
	7.01.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	*Rapat Koordinasi (Kali)*				*2*	690.000 *690.000*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					690.000	Kemantren Gondomanan
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						157.208.445							132.918.095	Kemantren Gondomanan
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor -alat listrik (Paket)*				*5*	3.755.500 *3.755.500*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					3.755.500	Kemantren Gondomanan
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Paket)*				*3*	47.056.595 *47.056.595*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					47.056.595	Kemantren Gondomanan
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						24.290.000							-	Kemantren Gondomanan

			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan (Paket)				*3*	*24.290.000*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi (Laporan)*				*12*	82.106.350 *82.106.350*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					82.106.000	Kemantren Gondomanan
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						8.700.000							-	Kemantren Gondomanan
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Pengadaan Printer (Unit)*				*6*	8.700.000 *8.700.000*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					-	Kemantren Gondomanan
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						590.758.000							1.500.000	Kemantren Gondomanan
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)*				*3*	1.500.000 *1.500.000*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					1.500.000	Kemantren Gondomanan
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Laporan)*				*36*	92.670.000 *92.670.000*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					-	Kemantren Gondomanan
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						496.588.000							-	Kemantren Gondomanan

			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Laporan)				*24*	*496.588.000*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						301.513.000							-	Kemantren Gondomanan
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Unit)*				*17*	103.775.000 *103.775.000*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					-	Kemantren Gondomanan
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Unit)*				*1*	12.238.000 *12.238.000*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					-	Kemantren Gondomanan
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						26.500.000							-	Kemantren Gondomanan

			Isi ulang APAR Kantor Kemantren dan Kelurahan (Buah) *Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (Unit)*				*4* *48*	*900.000* *25.600.000*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)* *(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah* *Lain-lain PAD Yang Sah*						
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Pemeliharaan Gedung Kantor (Unit)*				*2*	159.000.000 *159.000.000*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					-	Kemantren Gondomanan
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Gondomanan (poin)***				***88,70***	**28.984.250**							**0**	**Kemantren Gondomanan**
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum						9.900.000							-	Kemantren Gondomanan
	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	*Monitorig dan Evaluasi Pembangunan di Wilayah (Bulan)*				*12*	9.900.000 *9.900.000*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					-	Kemantren Gondomanan
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						19.084.250							-	Kemantren Gondomanan

	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	*Operasional Pelayanan Umum dan Perizinan (Bulan)*				*12*	19.084.250 *19.084.250*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					-	Kemantren Gondomanan
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondomanan (Rp/Tahun)***				***1032240000***	**442.141.448**							**0**	**Kemantren Gondomanan**
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						76.675.000							-	Kemantren Gondomanan
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Pentas Wayang Jogja Night Carnival (Kegiatan)* *Senam Gondomanan Sehat (Kegiatan)*				*1* *1*	76.675.000 *62.425.000* *14.250.000*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)* *(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah* *Lain-lain PAD Yang Sah*						-	Kemantren Gondomanan
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						57.124.948							-	Kemantren Gondomanan
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	*Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kemantren dan Kelurahan (Laporan)*				*3*	43.294.772 *43.294.772*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					-	Kemantren Gondomanan

	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan	*Evaluasi Kelurahan Tingkat Kemantren (Kegiatan)* *Penyusunan Data Monografi (Dokumen)* *Penyusunan Profil Kelurahan (Dokumen)*				*1* *1* *1*	13.830.176 *12.055.000* *720.000* *1.055.176*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)* *(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)* *(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah* *Lain-lain PAD Yang Sah* *Lain-lain PAD Yang Sah*					-	Kemantren Gondomanan
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						22.180.000							-	Kemantren Gondomanan
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	*Sarasehan Kelembagaan Masyarakat (Kali)*				*2*	13.100.000 *13.100.000*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					-	Kemantren Gondomanan
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	*Penyuluhan Tentang Peningkatan Kualitas Produk Gandeng Gendong (Kali)* *Pertemuan Rutin UMKM (Kali)*				*2* *4*	9.080.000 *5.400.000* *3.680.000*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)* *(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah* *Lain-lain PAD Yang Sah*					-	Kemantren Gondomanan
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						286.161.500							-	Kemantren Gondomanan

	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga						32.875.000							-	Kemantren Gondomanan
			FASILITASI GAPOKTAN (Orang)				*30*	*6.915.000*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
			GELAR POTENSI UMKM (Kegiatan)				*1*	*11.550.000*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
			PELATIHAN BARISTA (Orang)				*20*	*5.090.000*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
			PELATIHAN MEMBUAT UKIRAN BUAH DAN SAYUR (Orang)				*30*	*6.005.000*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
			PENYULUHAN TENTANG KUALITAS PRODUK UP2K (Orang)				*30*	*3.315.000*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing						56.277.500							-	Kemantren Gondomanan
			Latihan Karawitan (Orang)				*15*	*36.825.000*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
			Latihan Kethoprak (Orang)				*15*	*8.325.000*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						

			Lomba menu masakan B2SA (Kegiatan)				*1*	*8.827.500*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
			Monev dan Edukasi Pelaksanaan PMT (Kali)				*2*	*2.300.000*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
	7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup						47.984.000							-	Kemantren Gondomanan
			EVALUASI PEMBANGUNAN RW Se-KEMANTREN GONDOMANAN (Kegiatan)				*1*	*6.380.000*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
			FASILITASI BANK SAMPAH (Bulan)				*12*	*22.820.000*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
			GM BERSIH (Kali)				*12*	*18.784.000*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
	7.01.03.2.06.0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam						4.460.000							-	Kemantren Gondomanan
			PELATIHAN BENCANA KEBAKARAN (Orang)				*40*	*4.460.000*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
	7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas						144.565.000							-	Kemantren Gondomanan
			EVALUASI PEMBERDAYAAN KELURAHAN				*3*	*2.760.000*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKA*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						

			(Kali)						RTA)								
			Fasilitasi Forum Kecamatan Inklusi (Orang)				100	9.850.000	(Kemantren Gondoman an, KOTA YOGYAKA RTA)	Lain-lain PAD Yang Sah							
			FASILITASI KAREJA (Kegiatan)				3	10.330.000	(Kemantren Gondoman an, KOTA YOGYAKA RTA)	Lain-lain PAD Yang Sah							
			FASILITASI KEGIATAN KARANG TARUNA (Kegiatan)				2	5.680.000	(Kemantren Gondoman an, KOTA YOGYAKA RTA)	Lain-lain PAD Yang Sah							
			Fasilitasi Kegiatan PKK Kemantren (Bulan)				12	49.785.000	(Kemantren Gondoman an, KOTA YOGYAKA RTA)	Lain-lain PAD Yang Sah							
			FASILITASI PENANGGUL ANGAN KEMISKINAN (Bulan)				12	20.350.000	(Kemantren Gondoman an, KOTA YOGYAKA RTA)	Lain-lain PAD Yang Sah							
			KEGIATAN KESATUAN GERAK PKK (Kegiatan)				1	4.615.000	(Kemantren Gondoman an, KOTA YOGYAKA RTA)	Lain-lain PAD Yang Sah							
			PENANGANA N STUNTING (Bulan)				12	11.910.000	(Kemantren Gondoman an, KOTA YOGYAKA RTA)	Lain-lain PAD Yang Sah							
			PENYULUHA N POLA ASUH ANAK DAN REMAJA DI ERA DIGITAL (Orang)				40	4.540.000	(Kemantren Gondoman an, KOTA YOGYAKA RTA)	Lain-lain PAD Yang Sah							
			RAKORD SENI BUDAYA DAN OLAHRAGA (Kegiatan)				2	13.340.000	(Kemantren Gondoman an, KOTA YOGYAKA RTA)	Lain-lain PAD Yang Sah							

			RAPAT KOORDINASI TKSK, PSM (Kali)				*4*	*2.760.000*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
			SARASEHAN REMBUG MASALAH SOSIAL (Orang)				*40*	*3.810.000*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
			SARASEHAN SENI DAN BUDAYA (Orang)				*50*	*4.835.000*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	***Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Gondomanan (Pelanggaran)***				***130***	**175.585.000**							**0**	**Kemantren Gondomanan**
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						175.585.000							-	Kemantren Gondomanan
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	*FASILITASI PENGAMANAN DAN PEMANTAUAN WILAYAH (Bulan)*				*12*	*73.740.000*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*					-	Kemantren Gondomanan
			JOGO LEBARAN (Kegiatan)				*1*	*44.760.000*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						

			OPERASI KETERTIBAN WILAYAH (Bulan)				*12*	*27.600.000*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
			PENYULUHAN TTG KAPASITAS SATLINMAS (Orang)				*30*	*3.315.000*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
			PIKET SIAGA BENCANA (Hari)				*14*	*13.175.000*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
			SAPAAN ANAK KOS (Bulan)				*12*	*9.300.000*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
			SARASEHAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN WILAYAH40 (Orang)				*40*	*3.695.000*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Persentase permasalahan Kemantren Gondomanan terselesaikan sebagai hasil koordinasi (%)***				***100***	**71.200.000**							**0**	**Kemantren Gondomanan**
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						71.200.000							-	Kemantren Gondomanan
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional						21.170.000							-	Kemantren Gondomanan

			FASILITASI FORUM KEWASPADAN DINI MASYARAKAT (Orang)				*50*	*8.100.000*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
			FASILITASI FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN (Orang)				*50*	*13.070.000*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						50.030.000							-	Kemantren Gondomanan
			FASILITASI FORKOMPIMKA (Bulan)				*12*	*20.760.000*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
			FASILITASI KEGIATAN HUT RI (Kegiatan)				*1*	*29.270.000*	*(Kemantren Gondomanan, KOTA YOGYAKARTA)*	*Lain-lain PAD Yang Sah*						
	J U M L A H							**5.861.111.493**							4.111.234.945	

	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.137.006.868**							**0**	
	7.01	**KECAMATAN ADMINISTRASI**						**1.137.006.868**							**0**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kelurahan Ngupasan**					**1.137.006.868**							**0**	**Kelurahan Ngupasan**
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						1.137.006.868							-	Kelurahan Ngupasan

	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						522.128.500							-	Kelurahan Ngupasan
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						614.878.368							-	Kelurahan Ngupasan

1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kelurahan Prawirodirjan**					**1.266.040.000**							**0**	**Kelurahan Prawirodirjan**
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						1.266.040.000							-	Kelurahan Prawirodirjan
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						402.620.000							-	Kelurahan Prawirodirjan
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						863.420.000							-	Kelurahan Prawirodirjan
	J U M L A H T O T A L							**8.264.158.361**							**5.861.111.493**	

BAB V
PENUTUP

Renja Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta Tahun 2024 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta;
2. Penyusunan Renja Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta ini berpedoman pada Renstra Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2024 telah termuat dalam Renja. Selain itu, terdapat penambahan output/keluaran kegiatan sebagai mandatori dari Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 dan juga respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta;
3. Penyusunan Renja Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta ini juga berpedoman pada RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2024, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan;
4. Renja Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta Tahun 2024;
5. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan reviu yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Yogyakarta. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Yogyakarta dan Evaluasi Gubernur; dan
6. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Renja Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta Tahun 2024.

Selanjutnya program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Renja Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta Tahun 2024 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Yogyakarta.

Dengan disusunnya Renja Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta Tahun 2024 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta pada Tahun Anggaran 2024.

Yogyakarta, April 2023

MANTRI PAMONG PRAJA
KEMANTREN GONDOMANAN

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN GONDOMANAN

SUBARJILAN, S.I.P., M.Si.
NIP. 197207111992031006